



PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PELAPORAN DAN KETEPATAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Rembang)

Laila Fitriana, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of implementing government accounting standards, reporting systems, and accuracy of budget targets on the accountability of government agency performance in Rembang Regency. Based on existing theories and policies, a change in regional heads will cause the policies taken to be different from the previous period, including regarding budget policy. The research method used in this research is a survey method through the distribution of questionnaires. The objects studied were all skpd throughout Rembang Regency. The samples in this study were heads of SKPD departments/agencies, secretaries of SKPD departments/agencies, and employees in the finance/treasurer sector at SKPD departments/agencies throughout Rembang Regency. The data obtained was analyzed using the regression method using SPSS. The research results show that the three variables have a significant effect on the accountability of government agency performance. The three independent variables show the same influence on the dependent variable. The implementation of government accounting standards significantly influences the accountability of government agency performance. This is the same as the second variable in that the reporting system also influences the accountability of government agency performance positively and significantly. Apart from that, the third variable, budget target accuracy, also has a significant positive effect on the accountability of government agency performance.

Keywords: government accounting standards, reporting system, budget target accuracy, and performance accountability of government agencies.

PENDAHULUAN

Organisasi yang memanfaatkan dana masyarakat dikenal sebagai organisasi sektor publik. Pemerintah daerah harus bertindak untuk kepentingan daerah setempat, terutama dengan menumbuhkan kepercayaan melalui pemerintahan yang bersih dan transparan. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam menegakkan akuntabilitas keuangan melalui penerbitan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan.

Pada zaman sekarang ini perkembangan iptek sangatlah pesat. Hal ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab dari pemerintah atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian tujuan. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan dan regulator publik berupaya untuk memberikan tanggung jawab kepada organisasi untuk tindakan mereka dan memastikan bahwa organisasi memenuhi tanggung jawabnya (Tran, Nguyen, dan Hoang, 2020). Pengelolaan yang

¹ Corresponding author

dilakukan pemerintah terhadap wilayahnya masing-masing dapat digunakan sebagai penilaian terhadap AKIP.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) atau akuntansi berbasis akrual ketika melakukan penyusunan laporan keuangan. Indonesia menggunakan standar tersendiri yaitu SAP. Dalam PP No. 71/2010 (dalam BPK 2010) dinyatakan bahwa SAP adalah suatu sistem serangkaian prosedur, struktur organisasi, peralatan dan unsur-unsur lain dalam suatu organisasi pemerintah yang melaksanakan fungsi akuntansi mulai dari analisis sampai dengan pelaporan. Standar-standar ini diperlukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas. Penerapan SAP di lingkungan pemerintahan menjadi sangat penting karena dapat mendorong akuntabilitas dan keterbukaan dalam sebuah lembaga publik.

Menurut Sasongko (dalam Palgrave dkk, 2020), menyatakan bahwa rencana kegiatan yang dibayar secara kuantitatif yang dilaksanakan oleh manajemen dalam jangka waktu tertentu disebut sebagai anggaran. Menurut Adhikari dan Mellemvik (dalam Tran, Nguyen, dan Hoang, 2020) Organisasi publik sebagian besar didanai melalui anggaran negara dan, oleh karena itu, “bertanggung jawab” kepada publik atas aktivitas mereka. Peran ketepatan sasaran anggaran tentunya akan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja. Sangat penting bagi sistem pemerintah daerah untuk menetapkan sasaran anggaran yang tepat untuk menilai kinerja di lapangan sesuai dengan tujuan pembangunan. Ketepatan sasaran anggaran yang tepat akan memberikan masukan tentang bagaimana kinerja Pemda. Oleh karena itu, output atau hasil akhir yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan utama organisasi.

Sistem pelaporan yang baik tentunya sangat penting, agar kegiatan pemantauan dan pengendalian kinerja yang dilakukan para pegawai dapat diterapkan secara maksimal dan sesuai dengan anggaran awal yang telah ditentukan. Menurut Krambia-Kapardis et al (dalam Tran, Nguyen, dan Hoang, 2020) kualitas pelaporan keuangan sangat penting untuk penilaian organisasi publik dan akuntabilitas mereka terhadap pemangku kepentingan yang lebih luas. Pemerintah diwajibkan oleh peraturan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan lainnya agar para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dapat menggunakannya terkait dengan kegiatan pemerintahan, baik politik, sosial, dan ekonomi.

Kebijakan yang ada pada daerah yang satu dengan daerah yang lain pasti berbeda, sehingga standar akuntansi, sasaran anggaran, sistem pelaporan dan tingkat akuntabilitas suatu daerah juga berbeda. Kondisi tersebut yang terjadi di Kabupaten Rembang, dimana adanya pergantian kepala daerah pada kabupaten tersebut, menyebabkan kebijakan-kebijakan yang diambil akan berbeda dari periode sebelumnya, antara lain mengenai kebijakan anggaran.

Penelitian-penelitian terkait tiga isu ini juga ikut berkembang untuk memberikan kontribusi pemahaman pengaruh salah satu dari tiga isu tersebut terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akan tetapi, belum banyak penelitian terdahulu yang menggabungkan ketiga variabel ini dalam satu kerangka penelitian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan interpretasi yang komprehensif dengan menggabungkan tiga variabel sekaligus pada lingkup objek penelitian dengan objek penelitian yang lebih luas. Penelitian ini dimaksudkan agar pemahaman pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pelaporan, dan ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah didapatkan secara komprehensif.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori yang digunakan sebagai landasan teori adalah teori keagenan (*agency theory*) dan teori penetapan tujuan (*goal setting theory*). Menurut Saskia, Amin, dan Junaidi, (2020) teori agensi dalam organisasi menggambarkan suatu hubungan mengingat adanya pemahaman antara pihak *agent* dan pihak *principal*. Konsep *agency theory* mampu dipraktikkan dalam keberlangsungan organisasi publik. Teori agensi menggambarkan adanya hubungan yang berdasarkan perjanjian antara pihak agen dan pihak prinsipal. Hubungan ini menjadi penting karena digunakan sebagai pendekatan dalam memberikan analisis terhadap komitmen kebijakan publik. Dalam penelitian ini, rakyat diasumsikan sebagai prinsipal, sedangkan pemerintah adalah agen untuk menjalankan amanah demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan definisi teori keagenan yang telah dijelaskan di atas, Pemerintah Kabupaten Rembang bertindak sebagai *agent* yang dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya

dengan baik. Sedangkan masyarakat umum bertindak sebagai *principal* yang dapat bertindak sebagai pihak yang membutuhkan informasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh agen sebagai bahan pengambilan keputusan.

Diakui atau tidak pada pemerintah daerah tentu punya hubungan dan persoalan keagenan. Saat menyusun kontrak di organisasi publik, sistem administrasi yang baik harus diterapkan sehingga sifat *opportunities* dari para ahli dapat dihindari. Konflik organisasi yang terjadi antara agen dan *principal* dapat dibatasi dengan beberapa cara, yaitu dengan pengungkapan *corporate governance* pada masing-masing instansi pemerintah.

Menurut Locke (dalam Khairiyah, Akhmadi, dan Kusuma, 2013) menyatakan bahwa *goal setting theory* merupakan teori motivasi. Tujuan yang jelas dan menantang, serta umpan balik yang tepat, dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Dalam lingkup pemerintahan, penerapan teori ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi serta pelayanan publik. Dalam pendekatan ini, tujuan diidentifikasi sebagai tujuan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah. Penetapan tujuan memungkinkan seseorang untuk mensurvei konsekuensi dari pekerjaan saat ini dan membedakannya serta dampak dari pekerjaan sebelumnya. Menurut Locke (dalam Khairiyah, Akhmadi, dan Kusuma 2013) menjelaskan bahwa ketepatan anggaran dipengaruhi oleh teori *goal setting*. Setiap rencana anggaran mempermudah organisasi untuk mencapai sasaran kinerja. Anggaran menunjukkan dua hal: tujuan dan operasi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

Berdasarkan PP No. 71/2010 (dalam BPK 2010) dan menyebutkan bahwasanya SAP merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis mulai dari pelaksanaan mekanisme, ketatausahaan, peralatan serta bagian dari luar untuk menghasilkan kegunaan akuntansi mulai dari transaksi sampai dengan pembentukan laporan keuangan di lingkungan pemerintahan.

Menurut Setiawan djodi, Priatna husaeri, dan Wulansari Iuvita (2022) berpendapat bahwa suatu sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan kerangka tanggung jawab mulai dari bawahan (puncak unit rencana keuangan) hingga atasan (puncak divisi rencana pengeluaran). Pemerintah wajib untuk menyampaikan data keuangan dan data lain yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan para stakeholder baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.

Ketepatan sasaran anggaran dan pemahaman penggunaan rencana keuangan dilihat secara berkala dalam waktu tidak kurang dari satu tahun atau satu periode dan akan dibandingkan dengan hasil nyata (realisasi) di lapangan. Sasongko (dalam Palgrave dkk, 2020), menjelaskan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kegiatan dengan pembayaran kuantitatif yang dilaksanakan oleh manajemen dalam jangka waktu tertentu. Penganggaran pada dasarnya adalah proses penentuan besaran biaya serta peran dan tanggung jawab masing-masing manajer dalam melaksanakan rencana tersebut.

Akuntabilitas merupakan suatu konsep pertanggungjawaban dari sesuatu yang sudah diamanatkan atas perilaku individu atau organisasi. Menurut Kartika dan Sukanto (2019) menjelaskan tanggung jawab selalu dikaitkan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa suatu organisasi berkomitmen untuk mewakili apa yang tercapai dan apa yang belum dicapai dalam menjalankan tujuan utama organisasi Aziz, dkk (2015).

Sari & Tamsir (2023) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan sangat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi daerah Pohuwato. Anisa & Haryanto (2022) menjelaskan bahwa sistem pelaporan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adawiyah, Meyla & Solfiyeni (2022) menyatakan bahwa variabel ketepatan sasaran rencana belanja jelas mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kantor DPUTARU Kepulauan Mentawai. Dari penjabaran tersebut, penelitian ini mengusulkan tiga hipotesis sebagai berikut.

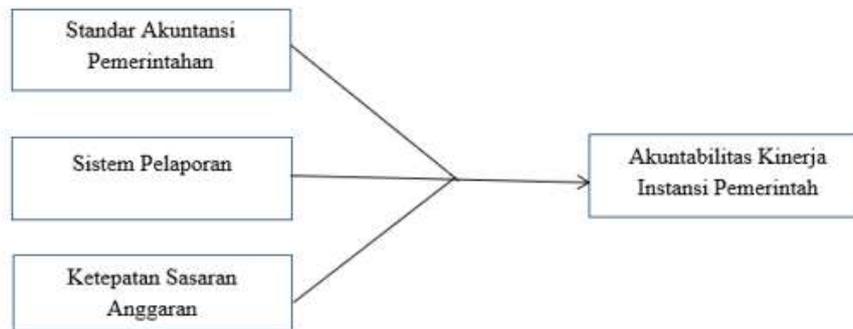
H₁: penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H₂: sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H₃: ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Model kerangka teori pada penelitian ini diilustrasikan sebagai berikut.

Gambar 2.1
Model Kerangka Teori



Sumber: dokumentasi pribadi

METODE PENELITIAN

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintahan, sistem pelaporan, dan ketepatan sasaran anggaran. Pengukuran variabel standar akuntansi pemerintahan menggunakan indikator pencatatan, penggolongan, dan pelaporan. Variabel sistem pelaporan diukur dengan menggunakan indikator dasar kas, dasar akrual, dan akuntansi keuangan. Pengukuran variabel ketepatan sasaran anggaran menggunakan indikator target anggaran, perencanaan anggaran, dan jangka waktu. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan menggunakan indikator akuntabilitas kejujuran, hukum, proses, program, dan kebijakan.

Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh skpd se-Kabupaten Rembang. Adapun sampel ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* merujuk pada kriteria spesifik. Kriteria pemilihan sampel antara lain: (1) Kepala dinas/badan pada setiap skpd se-Kabupaten Rembang; (2) Sekretaris dinas/badan pada setiap skpd se-Kabupaten Rembang; dan (3) Pegawai dinas/badan pada setiap skpd se-Kabupaten Rembang.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan metode survei melalui pendistribusian kuesioner.

Metode Analisis

Pendekatan yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS. Teknik analisis data yang dilakukan adalah statistik (1) deskriptif, (2) uji kualitas instrumen, yang terdiri dari pengujian validitas dan pengujian reliabilitas (3) uji non-response bias (4) uji asumsi klasik, yang terdiri dari pengujian normalitas, pengujian multikolinieritas, dan pengujian heteroskedastisitas, serta (3) uji hipotesis, yang terdiri dari uji F, Uji T, dan Koefisien Determinasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian, Uji Kualitas Instrumen, dan Uji Asumsi Klasik

Populasi yang dipilih adalah seluruh skpd se-kabupaten Rembang. Terdapat 41 skpd se-Kabupaten Rembang. Kuesioner yang didistribusikan kepada setiap instansi berjumlah 3 sehingga total kuesioner yang didistribusikan sebanyak 123 eksemplar. Akan tetapi, kuesioner yang kembali hanya berjumlah 114 eksemplar.

Data yang diperoleh 114 data. Data tersebut kemudian diolah secara statistik menggunakan SPSS versi 26.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Standar Akuntansi Pemerintahan	114	18	25	21.54	1.892
Sistem Pelaporan	114	25	35	28.82	2.216
Ketepatan Sasaran Anggaran	114	24	35	27.41	2.225
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	114	34	47	38.68	3.251

Sumber: olahan data SPSS

Seluruh variabel independen memiliki deviasi standar lebih kecil dari rata-rata. Kesimpulannya adalah seluruh variabel memiliki nilai deviasi standar yang lebih kecil dari nilai rata-rata. Artinya, sebaran data kecil sehingga mengindikasikan data yang baik, yaitu data yang digunakan tidak bias. Hal tersebut diperkuat dengan hasil uji validitas dari keseluruhan variabel penelitian yang hasil nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000.

Selanjutnya, uji reliabilitas untuk melihat apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan reliabel atau tidak. Pengujian reliabilitas dilakukan dan diputuskan dengan melihat nilai *Cronbach's alpha* > 0,60, maka instrumen penelitian dikatakan reliabel.

Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of items	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintahan	0,714	5	Reliabel
Sistem Pelaporan	0,798	7	Reliabel
Ketepatan Sasaran Anggaran	0,780	7	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,793	10	Reliabel

Sumber: olahan data SPSS

Kesimpulan berdasarkan Tabel 4.10 adalah keseluruhan variabel penelitian dikatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's alpha* > 0,60. Hal tersebut diperkuat dengan uji normalitas yang hasil nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200.

Selanjutnya, uji multikolinearitas untuk melihat hubungan antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dan diputuskan dengan melihat nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Variance Inflation Factor	Keputusan
X1	0,574	1,742	Tidak terjadi multikolinearitas
X2	0,541	1,848	Tidak terjadi multikolinearitas
X3	0,733	1,364	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: olahan data SPSS

Keterangan: X1 : Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan
 X2 : Variabel Sistem Pelaporan
 X3 : Variabel Ketepatan Sasaran Anggaran

Kesimpulan berdasarkan Tabel 4.8 adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hal tersebut karena tiap-tiap variabel independen yang memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10.

Pengujian berikutnya adalah uji heteroskedastisitas untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian residual antarpengamatan dalam model regresi. Pengujiannya menggunakan metode uji *Glesjer*.

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Unstandardized B	t	Sig.	Keputusan
X1	0,049	0,703	0,483	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X2	-0,027	-0,434	0,665	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X3	0,053	1,005	0,317	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: olahan data SPSS

Keterangan: X1 : Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan
 X2 : Variabel Sistem Pelaporan
 X3 : Variabel Ketepatan Sasaran Anggaran

Kesimpulan berdasarkan Tabel 4.14 adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal ini karena tiap variabel independen yang memiliki signifikansi > 0,05.

Uji Hipotesis dan Pembahasan

Uji koefisien determinasi menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen hanya sebesar 66,1%, sisanya karena faktor lain. Uji F menunjukkan secara bersamaan, variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi 0,000. Uji T menunjukkan hasil <0,05 dan memiliki hasil yang berbeda dari masing-masing variabel yang disajikan pada Tabel 4.18.

Tabel 4.5
Hasil Uji T

Variabel	Unstandardized B	t	Sig	Keputusan
X1	0,675	5,434	0,000	H ₁ diterima
X2	0,591	5,410	0,000	H ₂ diterima
X3	0,246	2,637	0,010	H ₃ diterima

Sumber: olahan data SPSS

Keterangan: X1 : Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan
 X2 : Variabel Sistem Pelaporan
 X3 : Variabel Ketepatan Sasaran Anggaran

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Keputusan berdasarkan analisis adalah hipotesis pertama diterima karena nilai Sig sebesar $0,000 < 0,05$, dan nilai koefisien regresi bernilai $0,675$. Hal tersebut menunjukkan pengaruh positif atau memiliki korelasi yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi. Menurut Saskia, Amin, dan Junaidi, (2020) yang menjelaskan bahwa dalam organisasi terdapat suatu hubungan mengingat adanya pemahaman antara pihak *agent* dan pihak *principal*. Konsep *agency theory* mampu dipraktikkan dalam keberlangsungan organisasi pemerintah. Teori agensi menggambarkan adanya hubungan yang berdasarkan perjanjian antara pihak agen dan pihak prinsipal. Hubungan ini menjadi penting karena digunakan sebagai pendekatan dalam memberikan analisis terhadap komitmen kebijakan pemerintah. Temuan tersebut sejalan dengan temuan dari Sari & Tamsir (2023) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan sangat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi daerah.

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Keputusan berdasarkan analisis adalah hipotesis kedua diterima karena nilai Sig sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya, sistem pelaporan yang diungkapkan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi. Menurut Saskia, Amin, dan Junaidi, (2020) yang menjelaskan bahwa dalam organisasi terdapat suatu hubungan mengingat adanya pemahaman antara pihak *agent* dan pihak *principal*. Konsep *agency theory* mampu dipraktikkan dalam keberlangsungan organisasi pemerintah. Teori agensi menggambarkan adanya hubungan yang berdasarkan perjanjian antara pihak agen dan pihak prinsipal. Hubungan ini menjadi penting karena digunakan sebagai pendekatan dalam memberikan analisis terhadap komitmen kebijakan pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan temuan dari Anisa & Haryanto (2022) yang menjelaskan bahwa sistem pelaporan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan

Keputusan berdasarkan analisis adalah hipotesis ketiga diterima karena nilai Sig sebesar $0,010 < 0,05$, yang menunjukkan pengaruh yang signifikan. Artinya, ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi. Menurut Saskia, Amin, dan Junaidi, (2020) yang menjelaskan bahwa dalam organisasi terdapat suatu hubungan mengingat adanya pemahaman antara pihak *agent* dan pihak *principal*. Konsep *agency theory* mampu dipraktikkan dalam keberlangsungan organisasi pemerintah. Teori agensi menggambarkan adanya hubungan yang berdasarkan perjanjian antara pihak agen dan pihak prinsipal. Hubungan ini menjadi penting karena digunakan sebagai pendekatan dalam memberikan analisis terhadap komitmen kebijakan pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Adawiyah, Meyla & Solfiyeni (2022) yang menjelaskan bahwa ketepatan sasaran rencana belanja jelas mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pelaporan, dan ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pelaporan, dan ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan mengungkap praktik penganggaran, pelaporan kinerja, serta penetapan kebijakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk menelaah proses pembuatan keputusan penganggaran dan pelaporan kinerja serta penetapan kebijakan.

Keterbatasan

Penelitian yang dilaksanakan masih terdapat berbagai kekurangan antara lain:

- a. Peneliti tidak dapat mengamati langsung responden dalam proses mengisi angket, maka peneliti tidak dapat menentukan apakah angket penelitian telah terisi sesuai dengan sampel yang diserahkan atau belum.
- b. Sampel dari masing-masing SKPD yang digunakan sebagai ujian dalam penelitian ini adalah 3 buah sampel saja.
- c. Banyaknya instansi pemerintahan yang harus dikunjungi pada setiap di SKPD Kabupaten Rembang menyebabkan siklus pengedaran kuesioner memakan waktu yang cukup lama.
- d. Metode yang diterapkan dalam proses pengumpulan informasi terbatas yang hanya bersumber dari pengisian kuesioner saja.

Saran

Penelitian yang dilaksanakan masih terdapat berbagai kekurangan antara lain:

- a. Memastikan bahwa responden dari sampel yang dibutuhkan telah mengisi kuesioner penelitian yang dibagikan.
- b. Memperluas jaringan sampel pada setiap instansi pemerintah yang menjadi subjek penelitian. Tidak hanya dalam lingkup pemerintah Kabupaten Rembang saja namun sampai se-provinsi Jawa Tengah.
- c. Peneliti dapat menambahkan lebih banyak lagi literatur, objek penelitian yang luas, dan Teknik pengumpulan data yang labi bervariasi dalam melakukan penelitian untuk dapat menganalisis hasil penelitian sehingga lebih valid.
- d. Peneliti dapat menambahkan variabel penelitian yang hampir sama seperti pengendalian akuntansi dan pemahaman akuntansi.
- e. Dalam penelitian juga diperlukan adanya penggunaan instrumen penelitian yang lain seperti wawancara, yang bertujuan untuk mempelajari lebih dalam terkait fakta-fakta mengenai masalah penelitian.

REFERENSI

- Adawiyah, Meyla dan Solfiyeni 2022. "Pengaruh ketepatan sasaran anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kepulauan Mentawai". *Pareso Jurnal* Volume 4:4
- Anisa Indah Nur, dan Haryanto. 2022. "Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19." *Jurnal Akuntansi Aktual* Volume 9:1.
- Aziz, Mohamad Azizal Abd, Hilmi Ab Rahman, Md. Mahmudul Alam, dan Jamaliah Said. 2015. "Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study." *Procedia Economics and Finance* 28(15): 163–69.
- BPK. 2010. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)."
- Kartika, Rusnanda Dian, dan Sukamto. 2019. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Daerah Kota Surabaya)." *Liability* 1(2): 63–83.
- Khairiyah, Yotasa Ra'ida, Muhammad Heru Akhmadi, dan Riris Setiawati Kusuma. 2013. "Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual." *Jurnal Kementrian Keuangan* 1: 127.
- Palgrave, The dkk. 2020. "Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi Kasus Pada Kantor Bpkad Kota Palopo)." *International Journal of Heritage Studies* 16(1): 1689–99.



- Sari & Tamsir. 2023. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato)". *Journal of Management & Business* Volume 6(1): 784-791.
- Saskia, N. A., Amin, M., Junaidi. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas, dan Value for Money terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(11), 53-69.
- Setiawan djodi, priatna husaeri, dan wulansari luvita. 2022. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Volume 13: 3.
- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The Role of Accountability in Determining the Relationship between Financial Reporting Quality and the Performance of Public Organizations: Evidence from Vietnam. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(1), 1-7. doi:10.1016/j.jaccpubpol.2020.106801.